

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan yang tengah dihadapi dunia saat ini. Masalah kemiskinan dihadapi semua negara di dunia terutama di negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sedang dihadapkan oleh pembangunan nasional dalam meningkatkan kinerja perekonomian guna tercipta lapangan kerja dan tertatanya kehidupan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan penduduk Indonesia. Berdasarkan data World Bank (2016), Indonesia menempati posisi ke-enam dengan jumlah orang miskin terbesar di dunia pada tahun 2014. Berdasarkan data BPS (2019), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,41% setara dengan 25,14 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin ini sebagian besar masih didominasi oleh daerah perdesaan yang mencapai 15,15 juta orang pada Maret 2019, sedangkan di perkotaan mencapai 9,99 juta orang pada Maret 2019. Semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat

perhatian pemerintah di negara manapun. Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang berada pada peringkat ke-2 dari sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera (BPS Sumatera Utara, 2018). Persentase penduduk miskin Perkotaan di Sumatera Utara mencapai 8,56%, sedangkan di perdesaan mencapai 8,83% (BPS, 2019). Kondisi pertumbuhan ekonomi justru memberikan sinyal kedekatan dengan indikator-indikator kemiskinan yang meningkat. Dilihat dari dampak desentralisasi pun, perbaikan dan peluang belum dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan data resmi kemiskinan menunjukkan adanya stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum era desentralisasi. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah memang terlihat di tingkat kampung, tetapi program ini sering tidak memenuhi harapan pejabat pemerintah daerah dan warga karena lemahnya implementasi dan mekanisme kontrol.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008. Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan . Akibat dari pemekaran tersebut maka kabupaten tersebut mengalami perkembangan dari beberapa aspek. Salah satunya aspek sosial demografi yang mengalami peningkatan dilihat dari jumlah penduduk yang meningkat diakibatkan oleh masyarakat yang bermigrasi

sehingga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan digolongkan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 277.673 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 296.763 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 326.825 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 326.837 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 332.925 jiwa (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2015-2019). Penduduk miskin berjumlah 33.140 jiwa (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2018).

Kecamatan Kotapinang merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kecamatan Kotapinang merupakan Ibu kota dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kecamatan Kotapinang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, yang memiliki daerah terluas adalah Desa Sisumut dengan luas 113,30 km² dan yang terkecil adalah Desa Sosopan 30,50 km². Desa yang terjauh dari Ibukota Kotapinang adalah Desa Pasir Tuntung dengan jarak 37,00 km². Jumlah penduduk yang ada di Kotapinang sebanyak 63.405 jiwa (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2019), sedangkan jumlah penduduk miskin yang ada di Kotapinang sebanyak 2.582 jiwa (Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Kecamatan Kotapinang yang pada saat ini menjadi Ibu kota dan menjadi pusat pertumbuhan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami penambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 53.954 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 60.228 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 61.322 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 62.400 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 63.045 jiwa (BPS Kecamatan Kotapinang 2015-2019). Namun masih banyaknya terdapat pengangguran di Kecamatan Kotapinang yang berumur 15 tahun ke atas yaitu 9.870 jiwa, banyak anak-anak

putus sekolah dari umur 7-15 tahun sebanyak 1.500 jiwa dan umur 16-18 tahun sebanyak 6.850 jiwa (BPS Kecamatan Kotapinang, 2019). Masih banyaknya terdapat rumah tidak layak huni yang di lihat dilapangan saat peneliti melakukan observasi.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Kotapinang tahun 2019.

NO	Kelurahan/Desa	Jumlah penduduk (Jiwa)	Keluarga Miskin (KK)	Persentase (%)
1	Sisumut	4.005	758	18,92
2	Kotapinang	24.773	525	9,60
3	Pasir Tuntung	3.138	451	14,37
4	Simatahari	1.542	228	14,78
5	Hadundung	1.205	117	9,70
6	Perkebunan Normark	2.663	36	1,35
7	Mampang	1.807	246	13,61
8	Sosopan	5.466	162	0,65
9	Nagodang	2.920	29	0,99
10	Rumbia	15.886	30	0,18

Sumber : Dinas Sosial Kecamatan Kotapinang, 2019

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa Kecamatan Kotapinang yang merupakan sebagai ibu kota dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menjadi pusat pemerintahan ternyata masih banyak kemiskinan yang belum teratasi dan masih banyak pengangguran, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor dan Penyebab Kemiskinan Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi bahwa:

1. Banyak pengangguran di Kecamatan Kotapinang,
2. Banyak anak-anak tidak sekolah di Kecamatan Kotapinang,
3. Faktor dan penyebab kemiskinan yang di lihat dari kemiskinan natural, kemiskinan struktural, kemiskinan kultural.
4. Kemiskinan yang belum bisa teratasi oleh pemerintah di Kecamatan Kotapinang

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, maka masalah dibatasi pada faktor penyebab kemiskinan Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab kemiskinan di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor penyebab kemiskinan di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Mengetahui upaya Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian geografi dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan.
2. Menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis pada waktu dan lokasi yang berbeda.
3. Menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait penelitian penyebab kemiskinan.
4. Menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah guna memberdayakan, dan strategi dalam menanggulangi kemiskinan.

Dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan guna mengurangi kemiskinan.